

BAB II

LANDASAN TEORI: KONSEPSI INKLUSI TERHADAP DIFABEL

A. Konsep Inklusi

Secara etimologis, istilah “inklusi” berasal dari bahasa Latin “inclusio,” yang berarti “penyertaan” atau “memasukkan.” Kata ini terbentuk dari dua komponen: “in-” yang berarti “di dalam” atau “masuk,” dan “claudere” yang berarti “menutup.” Kata Latin inclusion ini kemudian diserap ke dalam Bahasa Inggris dengan “inclusion” yang berarti: 1) *‘the fact of including somebody/something; the fact of being included’* atau ‘Fakta dari memasukkan seseorang/sesuatu; fakta dari menjadi dimasukkan’; 2) *‘a person or thing that is included’* atau ‘seseorang atau hal yang dimasukkan’; 3) *the fact or policy of providing equal opportunities and resources for people who might otherwise not get them, for example people who are disabled or belong to minority groups* atau ‘Fakta atau kebijakan untuk menyediakan kesempatan dan sumber daya yang sama bagi orang-orang yang mungkin tidak akan mendapatkannya, misalnya orang-orang yang cacat atau berasal dari kelompok minoritas’.¹⁴ Dengan demikian, secara harfiah, “inklusi” mengacu pada tindakan memasukkan sesuatu ke dalam suatu kelompok atau struktur dan memastikan bahwa hal tersebut tidak dikecualikan atau dikucilkan dan ditutup dari akses.

Pengertian etimologi “inklusi” kemudian berkembang dan diaplikasikan dalam berbagai konteks sosial dan akademis untuk merujuk pada praktik dan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu atau kelompok, terutama mereka yang seringkali terpinggirkan atau dikecualikan (seperti orang dengan disabilitas, kelompok minoritas, dan lainnya), diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dalam masyarakat. perkembangan penggunaan konsep inklusi diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, dan pekerjaan untuk menggambarkan proses dan praktik yang memastikan bahwa semua individu, terutama mereka yang rentan atau seringkali terpinggirkan, mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara penuh dan setara.

1. Inklusi dalam Bidang Pendidikan

Konsep inklusi dalam pendidikan diterapkan dalam istilah pendidikan inklusif yang mengacu pada komitmen bersama antar negara-negara yang bergabung di *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pada tahun 1994.¹⁵ Pendidikan inklusi mewadahi misi yang memastikan bahwa semua siswa,

¹⁴ Oxford Learner’s Dictionaries, “Inclusion,” Oxford University Press, 2024, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/inclusion?q=inclusion>.

¹⁵ Ane Qvortrup and Lars Qvortrup, “Inclusion: Dimensions of Inclusion in Education,” *International Journal of Inclusive Education* 22, no. 7 (2018): 803–17, <https://doi.org/10.1080/13603116.2017.1412506>.

tanpa terkecuali, memiliki akses yang setara ke lingkungan belajar yang mendukung dan adaptif. Ini berarti bahwa siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas tidak hanya diterima di sekolah umum, tetapi juga diberikan dukungan yang memadai untuk memastikan mereka dapat belajar dan berkembang secara optimal bersama teman-teman mereka. Penerapan konsep ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan berbagai kemampuan dan gaya belajar siswa, hingga metode pengajaran yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan individu. Guru-guru dilatih untuk mengenali dan mendukung berbagai kebutuhan siswa, serta menggunakan strategi pembelajaran yang inklusif.¹⁶

Selain itu, infrastruktur sekolah juga harus dirancang atau disesuaikan untuk menghilangkan hambatan fisik yang mungkin dihadapi oleh siswa dengan disabilitas. Ini bisa berarti menyediakan akses yang mudah ke ruang kelas, fasilitas sanitasi yang ramah disabilitas, serta alat bantu belajar seperti perangkat teknologi asistif. Sekolah juga perlu memastikan adanya dukungan tambahan seperti layanan terapi, konseling, dan pendampingan khusus bagi siswa yang membutuhkannya.¹⁷

Secara terminologis, “inklusi” merujuk pada konsep atau kebijakan yang memastikan kehadiran, partisipasi, dan pengakuan penuh bagi semua individu atau kelompok dalam suatu lingkungan, baik itu lingkungan sosial, pendidikan, atau kerja. Istilah ini menyoroti pentingnya mengakui dan menghargai keberagaman serta memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, kesempatan, dan layanan. Secara keseluruhan, inklusi adalah prinsip atau nilai yang mendasari upaya untuk menciptakan masyarakat, institusi, atau lingkungan di mana semua orang merasa diakui, dihargai, dan didukung untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan sosial, pendidikan, atau profesional.

Penerapan konsep inklusi secara menyeluruh menjadi upaya sekolah untuk menciptakan lingkungan yang tidak hanya menerima keberagaman, tetapi juga merayakannya. Siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan dan berinteraksi dengan berbagai individu dari latar belakang yang berbeda, yang pada gilirannya membangun rasa empati dan toleransi. Melalui pendekatan ini, tujuan utama pendidikan inklusif adalah untuk memberikan setiap siswa kesempatan yang adil untuk sukses, baik secara akademis maupun sosial, serta mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dan produktif dalam masyarakat yang lebih luas.

2. Inklusi dalam Konteks Sosial

Gutama dan Widiyahseno mengacu pada pandangan Simarmata dan Ningrum tentang konsep inklusi sosial secara teoritis. Menurut mereka, inklusi sosial adalah

¹⁶ Rona Fitria, “Proses Pembelajaran Dalam Setting Inklusi Di Sekolah Dasar,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus* 1 (2012): 5, <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jupekhu>.

¹⁷ Reni Ariastuti and Vitri Dyah Herawati, “Optimalisasi Peran Inklusi,” *Pengabdian Pada Masyarakat* 1, no. 1 (2016): 41.

proses yang memberikan kekuatan kepada individu atau kelompok tertentu agar bisa ikut serta dalam kehidupan sosial, entah itu secara penuh atau sebagian. Konsep inklusi sosial ini bertolak belakang dengan eksklusi sosial, yang merupakan kondisi di mana suatu kelompok atau individu diasingkan dari masyarakat, sehingga mereka kehilangan kemampuan dan kekuatan untuk terlibat dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Eksklusi sosial sering terjadi karena adanya perbedaan dalam latar belakang, seperti status sosial atau perbedaan pandangan, yang menyebabkan sebagian individu merasa terpinggirkan dalam masyarakat.¹⁸

Inklusi memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk minoritas dan individu dengan keterbatasan, dapat berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi tanpa diskriminasi atau hambatan. Ini mencakup upaya untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi setiap individu, terlepas dari latar belakang, kondisi fisik, atau status sosial mereka. Inklusi sosial berupaya memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, memperoleh kesempatan yang setara untuk menjalani kehidupan sosial dan memperoleh akses terhadap layanan publik.

Untuk mencapai inklusi sosial, perlu adanya kebijakan yang adil dan pemberdayaan komunitas yang bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan. Misalnya, pemerintah dan organisasi masyarakat dapat mengembangkan program-program yang memberikan pelatihan keterampilan bagi kelompok minoritas dan individu dengan disabilitas, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu, inisiatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi dan mengubah sikap diskriminatif melalui kampanye pendidikan dan media sangat penting.

Inklusi sosial juga berarti mengadaptasi infrastruktur publik agar dapat diakses oleh semua orang, termasuk transportasi yang ramah disabilitas, bangunan yang mudah diakses, dan fasilitas umum yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Teknologi juga memainkan peran penting dalam mendukung inklusi dengan menyediakan alat dan platform yang memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan inklusif dalam berbagai aktivitas. Pada akhirnya, inklusi sosial bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan mampu berkontribusi secara maksimal. Dengan memperkuat inklusi sosial, kita membangun dasar bagi kesetaraan yang lebih besar, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Hal ini tidak hanya menguntungkan individu yang sebelumnya terpinggirkan tetapi juga memperkaya masyarakat secara keseluruhan dengan keberagaman perspektif dan pengalaman.

¹⁸ Prima Putra Budi Gutama and Bambang Widiyahseno, "Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa," *Reformasi* 10, no. 1 (2020): 74, <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1834>.

3. Inklusi dalam Lingkungan Kerja

Mustari dan lainnya mengacu pada penjelasan Bedi tentang inklusi di tempat kerja yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diakui, didengarkan, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkembang.¹⁹ Konsep inklusi di lingkungan kerja tidak hanya merupakan suatu keharusan moral, tetapi juga menjadi fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan dan kesuksesan sebuah organisasi. Inklusi di tempat kerja melibatkan penciptaan budaya yang memahami, menghargai, dan merayakan keberagaman dalam segala bentuknya. Ini berarti memastikan bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang mereka, merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan berkembang.

Salah satu aspek penting dari inklusi di tempat kerja adalah memperluas pandangan tentang keberagaman, tidak hanya dalam hal identitas seperti etnisitas, agama, gender, dan orientasi seksual, tetapi juga dalam hal kemampuan, pengalaman, dan sudut pandang. Hal ini membutuhkan kebijakan yang inklusif dalam proses perekrutan, promosi, dan pengembangan karier, serta dukungan untuk karyawan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin mereka hadapi.

Diniarsa dan Lumban Batu merujuk pada gagasan yang disampaikan oleh Roberge tentang pentingnya menerapkan praktik manajemen keragaman dalam struktur organisasi. Alasan di balik pentingnya hal ini adalah karena praktik tersebut membantu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghormati keberagaman. Dalam hal memberikan promosi dan pelatihan, organisasi harus memastikan bahwa semua karyawan memiliki akses yang setara terhadap peluang karier dan sumber daya yang tersedia. Untuk mencapai hal ini, penting untuk menjalankan proses seleksi yang adil dan tanpa diskriminasi, serta memastikan bahwa kualifikasi dan kompetensi karyawan diakui secara objektif.²⁰

Lingkungan kerja yang inklusif mempromosikan kolaborasi dan kerjasama antara beragam individu, menciptakan platform di mana ide-ide baru dapat muncul dan dipertukarkan secara bebas. Tim yang inklusif cenderung lebih kreatif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan, karena mereka dapat mengeksplorasi berbagai perspektif dan solusi yang lebih beragam. Selain itu, inklusi di tempat kerja juga menciptakan manfaat langsung bagi perusahaan, seperti peningkatan retensi karyawan, reputasi yang lebih baik, dan kemampuan untuk menarik bakat terbaik dari berbagai latar belakang. Karyawan yang merasa diakui dan dihargai cenderung

¹⁹ Vera Herlina Mustari et al., "Pengaruh Diversitas dan Inklusi Terhadap Kinerja Organisasi," *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 7, no. 2 (2024): 3200.

²⁰ Maulidya Rosma Diniarsa and Reminta Lumban Batu, "Evaluasi Penerapan Kebijakan Diversitas Dan Inklusi Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Organisasi," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 7, no. 2 (2023): 1445, <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.2852>.

lebih berdedikasi dan berkomitmen terhadap perusahaan, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kinerja keseluruhan.

Bagi sebuah perusahaan, prinsip kesetaraan (inklusi) bukan sekadar landasan moral, tetapi juga fondasi yang memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan setara. Prinsip ini tercermin dalam norma, kebijakan, dan praktik yang mengatur operasi perusahaan. Ketika setiap anggota tim diperlakukan tanpa prasangka dan dengan menghargai keunikan mereka, hal ini menciptakan iklim kerja yang inklusif dan nyaman bagi semua karyawan. Dalam suasana seperti ini, karyawan merasa didukung dan dihargai, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam pekerjaan. Selain itu, kesetaraan juga mendorong kemajuan perusahaan dengan memanfaatkan keragaman yang dimiliki oleh tim. Dengan menyatukan berbagai bakat, pengalaman, dan sudut pandang, perusahaan dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis. Dengan demikian, kesetaraan di tempat kerja tidak hanya menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif, tetapi juga menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang perusahaan.²¹

Sebuah perusahaan membutuhkan untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, mulai dari menyusun kebijakan dan prosedur yang mendukung keberagaman hingga menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi manajer dan karyawan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang inklusi dan membangun keterampilan untuk berinteraksi dengan beragam individu. Dengan demikian, inklusi di tempat kerja bukan hanya menjadi tujuan yang dikejar, tetapi juga menjadi bagian integral dari budaya dan identitas organisasi yang kuat.

B. Inklusi Difabel

Terdapat dua istilah di dalam perbendaharaan bahasa yang sering digunakan untuk merujuk pada kondisi keterbatasan fisik, sensorik, kognitif, atau perkembangan pada individu: disabilitas dan difabel. Untuk memahami perbedaan antara keduanya, kita dapat menilik dari segi etimologi dan terminologi yang membentuk landasan penggunaan kedua istilah tersebut. Uraian pengertian keduanya dan istilah mana yang dipergunakan akan didiskusikan lebih lanjut.

Secara etimologis, istilah “disabilitas” berasal dari bahasa Inggris dengan kata “*disability*”. dengan awalan “dis-” yang berarti “tidak” atau “melawan”, serta “ability” yang berarti “kemampuan”. Secara lebih rinci pengertian “*disability*” berarti: 1) “*a physical or mental condition that makes it difficult for somebody to do some things that most other people can do*” atau ‘sebuah kondisi fisik atau mental yang membuat seseorang kesulitan untuk melakukan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kebanyakan orang lain’; 2) *the state of having a physical or mental*

²¹ Calvin et al., “Analisa Strategi Diversity Analytic Pada Suatu Perusahaan,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 4, no. 2 (2023): 1246.

condition that makes it difficult to do some things that most other people can do atau ‘keadaan memiliki kondisi fisik atau mental yang membuat sulit untuk melakukan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh kebanyakan orang lain’.²² Dengan demikian, disabilitas pada dasarnya merujuk pada kondisi di mana seseorang mengalami kurangnya atau hilangnya kemampuan tertentu sebagaimana umumnya manusia, yang secara langsung membatasi partisipasi mereka dalam aktivitas sehari-hari.

Di sisi lain, istilah “difabel” berasal dari bahasa Inggris, dengan kata “difa-” yang mengandung makna “berbeda” dan “able” yang berarti “mampu”. Ada juga pengertian lain dari difabel yang berasal dari Bahasa Inggris, yaitu kata “*diffabled*” yang berarti ‘*a person with a disability who is considered differently abled*’ atau ‘Seorang individu dengan disabilitas yang dianggap memiliki kemampuan dan potensi yang unik atau berbeda dari mayoritas’.²³ Pengertian lainnya merujuk kepada kata “*diffable*” yang berarti ‘*someone who has different abilities*’ atau ‘seseorang yang memiliki kemampuan yang berbeda’.²⁴ Jadi, difabel menyoroti konsep bahwa individu dengan keterbatasan memiliki kemampuan yang berbeda dari mayoritas, dan kemungkinan memerlukan dukungan atau adaptasi untuk memfasilitasi partisipasi mereka dalam berbagai aktivitas.

Dari segi terminologi, “disabilitas” digunakan secara luas untuk merujuk pada kondisi-kondisi keterbatasan yang dapat bervariasi, termasuk keterbatasan fisik, sensorik, kognitif, atau perkembangan. Di sisi lain, di Indonesia, istilah “difabel” telah diperkenalkan sebagai alternatif untuk menggantikan istilah “disabilitas”. Penggunaan istilah ini menekankan pada aspek keberagaman kemampuan dan menyoroti keunikan serta potensi individu dengan keterbatasan. Dengan demikian, perbedaan antara disabilitas dan difabel terletak pada penekanan masing-masing istilah terhadap kurangnya kemampuan versus keberagaman kemampuan dan potensi individu. Meskipun keduanya merujuk pada kondisi keterbatasan, penggunaan istilah yang berbeda dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami dan mengakomodasi kebutuhan individu dengan keterbatasan.

Di Indonesia, ada tren yang semakin meningkat untuk lebih memilih istilah “difabel” ketimbang “disabilitas” di kalangan para aktivis dan pelaku sosial yang prihatin terhadap masalah keterbatasan fisik, mental, atau perkembangan.²⁵ Perubahan preferensi ini mencerminkan pergeseran dalam pemahaman serta pendekatan terhadap individu dengan keterbatasan di tengah masyarakat. Penggunaan istilah “difabel” merujuk pada pendekatan yang lebih positif dan

²² Oxford Learner’s Dictionaries, “Disability,” Oxford University Press, 2024, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/disability?q=disability>.

²³ Robert Michael Hensel, “Diffabled,” Urban Dictionary, 2008, <https://www.urbandictionary.com/define.php?term=diffabled>.

²⁴ Buck Neeley, “Diffable,” Urban Dictionary, 2021, <https://www.urbandictionary.com/define.php?term=diffabled>.

²⁵ Maftuhin, “Difabel Dan Penyandang Disabilitas.”

inklusif terhadap individu yang memiliki keterbatasan. Istilah ini menekankan pada keberagaman kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh setiap individu, menyoroti bahwa mereka tidak sekadar difabel atau memiliki keterbatasan, melainkan juga memiliki kekuatan serta potensi yang unik.

Lebih dari sekadar istilah, pemilihan “difabel” juga bertujuan untuk mengurangi stigmatisasi dan diskriminasi terhadap individu dengan keterbatasan. Dengan menekankan pada kemampuan individu, istilah ini membantu membangun citra yang lebih positif serta menghargai keberagaman dalam lingkungan sosial. Selain itu, pemilihan istilah “difabel” juga mempertimbangkan aspek budaya dan konteks sosial di Indonesia. Istilah ini lebih dapat diterima serta dipahami oleh masyarakat secara umum, sehingga dapat mendukung upaya advokasi hak serta kesejahteraan individu dengan keterbatasan.

Dengan demikian Inklusi terhadap difabel adalah konsep dan pendekatan yang memastikan bahwa individu dengan disabilitas atau keterbatasan dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Ini melibatkan penciptaan lingkungan yang mendukung, bebas dari hambatan fisik, sosial, dan psikologis yang dapat menghalangi partisipasi mereka.

Secara keseluruhan, pergeseran penggunaan istilah dari “disabilitas” menjadi “difabel” mencerminkan evolusi dalam pemahaman dan sikap terhadap individu dengan keterbatasan. Pergeseran ini tidak hanya mengubah cara kita berbicara tentang individu dengan keterbatasan, tetapi juga menunjukkan perubahan mendasar dalam cara kita memandang mereka. Istilah “difabel” menekankan pada kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh setiap individu, daripada fokus pada keterbatasan mereka. Hal ini mencerminkan sebuah masyarakat yang semakin inklusif, di mana setiap orang dihargai atas kontribusi unik mereka, terlepas dari perbedaan fisik atau mental. Dengan menggunakan istilah “difabel,” kita mengakui bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan bahwa perbedaan ini seharusnya tidak menjadi penghalang untuk partisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Penggunaan istilah “difabel” juga membantu mengurangi stigma dan diskriminasi yang seringkali terkait dengan istilah “disabilitas.” Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk sukses dan berkembang. Dengan demikian, perubahan terminologi ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga mencerminkan komitmen yang lebih dalam terhadap kesetaraan dan inklusi. Maka secara keseluruhan, pergeseran ini menunjukkan bahwa kita semakin memahami pentingnya menghargai keberagaman dan menciptakan lingkungan yang mendukung semua individu, tanpa memandang perbedaan mereka. Ini adalah langkah maju yang signifikan menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana setiap individu dapat merasa diterima dan dihargai.

C. Pandangan dan Sikap terhadap Difabel dalam Lintas Sejarah

Sepanjang sejarah, pandangan dan sikap terhadap kaum difabel telah mengalami perubahan yang signifikan, dipengaruhi oleh kepercayaan agama, norma sosial, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Secara historis, perlakuan terhadap difabel telah mengalami evolusi dari masa pengucilan dan diskriminasi menuju era modern yang lebih inklusif dan menghormati hak-hak mereka. Perubahan ini mencerminkan peningkatan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman dan kemanusiaan, mengarahkan kita pada masyarakat yang lebih adil dan setara.

Berikut ini adalah narasi ilmiah yang lebih ringkas dan mudah dipahami tentang perlakuan terhadap difabel dari masa ke masa:

Peradaban Kuno

Pada masa peradaban kuno seperti Mesir Kuno, difabel umumnya dirawat oleh keluarga mereka. Meskipun sedikit sekali bukti yang dapat ditemukan, akan tetapi masih terdapat beberapa peninggalan sejarah yang menjelaskan bahwa mereka masih bisa berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, meskipun pemahaman medis terhadap kondisi mereka sangat terbatas. Ead mengemukakan bahwa di Mesir kuno, orang-orang dengan disabilitas seringkali terlibat dalam berbagai profesi dan perdagangan²⁶ seperti penulis. Orang-orang dengan disabilitas, termasuk yang buta atau memiliki gangguan fisik, seringkali mendapat pelatihan sebagai penulis. Ini merupakan pekerjaan bergengsi di Mesir kuno, dan para penulis bertanggung jawab atas mencatat informasi, menulis surat, dan mengelola catatan keuangan.

Mereka juga menjadi musisi, orang-orang dengan disabilitas juga bekerja sebagai musisi di Mesir kuno. Sebagai contoh, seorang musisi buta terkemuka bernama Harkhuf dicatat dalam prasasti dari Kerajaan Lama, dihormati karena kemampuan musiknya. Pekerjaan lainnya adalah sebagai tukang. Orang-orang dengan disabilitas juga bekerja sebagai tukang di Mesir kuno. Sebagai contoh, sebuah patung terkenal yang menggambarkan dewa Ptah-Sokar-Osiris dengan kaki yang cacat menunjukkan bahwa orang-orang dengan disabilitas masih bisa menjadi tukang yang terampil.

Disisi lain mereka juga menjadi Pengemis. Meskipun bukan profesi formal, beberapa orang dengan disabilitas di Mesir kuno kadang-kadang mengemis untuk sedekah. Namun, bahkan pengemis sering kali dihormati dan menerima sedekah sebagai bentuk amal. Secara keseluruhan, orang-orang dengan disabilitas di Mesir kuno tidak dikecualikan dari kehidupan publik atau kesempatan kerja. Mereka

²⁶ Hamed Abdelreheem Ead, "Historical Perspectives on Disability in Egypt: Attitudes and Policies," *Athens Journal of Mediterranean Studies* 10, no. 2 (2024): 122–23, <https://doi.org/10.30958/ajms.10-2-3>.

diberikan kesempatan untuk berkontribusi pada masyarakat dan dihargai karena keterampilan dan kemampuan mereka, tanpa memandang perbedaan fisik mereka.

Di Yunani dan Romawi Kuno, pandangan terhadap difabel mencerminkan spektrum pemikiran yang luas. Meskipun beberapa filsuf terkemuka seperti Plato dan Aristoteles mengadvokasi praktik eugenika, yang pada gilirannya menyebabkan stigma dan pandangan negatif terhadap difabel, pandangan ini tidak sepenuhnya mencerminkan pandangan umum. Ada juga bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat kuno memberikan peran penting bagi individu difabel. Misalnya, dalam budaya Romawi, beberapa difabel diberi pekerjaan yang memiliki signifikansi sosial, seperti menjadi bagian dari pawai keagamaan atau mendapatkan posisi di pemerintahan. Selain itu, catatan sejarah juga menunjukkan bahwa beberapa difabel menerima perawatan medis dan dukungan dari komunitas mereka, terutama di lingkungan yang lebih kaya atau di bawah perlindungan patron. Oleh karena itu, walaupun pandangan negatif terhadap difabel tidak dapat diabaikan, kompleksitas dalam pandangan masyarakat kuno mengenai difabel mencerminkan keragaman pendapat dan perlakuan terhadap kelompok ini.²⁷

Abad Pertengahan

Selama abad pertengahan di Eropa, agama Kristen memainkan peran kunci dalam membentuk pandangan dan perlakuan terhadap individu difabel. Dalam konteks spiritualitas Kristen yang kuat, difabel sering dianggap sebagai “objek belas kasihan dan amal”, dilihat sebagai penerima kasih dan bantuan dari yang berkekuatan. Ajaran agama Kristen menekankan pentingnya kebaikan, kasih sayang, dan perbuatan amal sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Oleh karena itu, para difabel sering kali dipandang sebagai kesempatan untuk melaksanakan ajaran tersebut melalui perbuatan baik dan kepedulian terhadap sesama yang kurang beruntung.²⁸

Keterkaitan antara agama Kristen dan perlakuan terhadap difabel tercermin dalam berbagai praktik keagamaan pada masa itu. Misalnya, rumah sakit dan lembaga amal dibangun di seluruh Eropa dengan tujuan memberikan perawatan dan bantuan kepada orang-orang yang sakit, cacat, atau tidak mampu. Para biarawan dan biarawati sering kali mendirikan lembaga-lembaga tersebut sebagai bagian dari misi sosial dan pelayanan mereka yang didorong oleh ajaran agama Kristen. Meskipun pandangan ini sering kali mengakibatkan difabel dianggap sebagai penerima pasif dari belas kasihan, tetapi juga membawa aspek positif dalam memberikan perlindungan dan perawatan bagi individu yang membutuhkan. Hal

²⁷ Comba Wa Munyi, “Past and Present Perceptions towards Disability: A Historical Perspective,” *Disability Studies Quarterly* 32, no. 2 (2012), <https://dsq-sds.org/index.php/dsq/article/view/3197/3068>.

²⁸ Matthew J. Schuelka, “A Faith in Humanness: Disability, Religion and Development,” *Disability and Society* 28, no. 4 (2013): 503–305, <https://doi.org/10.1080/09687599.2012.717880>.

ini menunjukkan kompleksitas dalam hubungan antara agama, masyarakat, dan individu difabel selama abad pertengahan di Eropa.

Dalam dunia Islam, difabel diperlakukan dengan lebih inklusif dan mendapatkan perhatian yang lebih besar. Nabi Muhammad SAW sendiri memberikan contoh nyata dengan menghormati dan melibatkan difabel dalam masyarakat. Terdapat berbagai riwayat yang mencatat bagaimana Nabi Muhammad memberikan perhatian khusus kepada individu difabel, menghadiri kebutuhan mereka, dan memberikan dukungan moral serta sosial. Selain itu, ajaran Islam juga mendorong umatnya untuk memberikan zakat dan sedekah kepada mereka yang membutuhkan, termasuk difabel. Institusi-institusi zakat dan sedekah dipandang sebagai sarana untuk memastikan bahwa difabel mendapatkan dukungan finansial dan bantuan yang diperlukan agar dapat hidup secara layak dan mandiri dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam ajaran dan praktek Islam, inklusi dan perhatian terhadap individu difabel dianggap sebagai bagian penting dari nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial.²⁹

Zaman Modern Awal

Pada masa Renaisans dan Pencerahan, terjadi perubahan sikap yang signifikan terhadap difabel karena kemajuan dalam pemahaman ilmiah dan medis. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan, masyarakat mulai mengakui kemanusiaan dan potensi individu difabel. Hal ini menyebabkan pendirian rumah sakit dan lembaga khusus yang bertujuan untuk memberikan perawatan dan dukungan bagi difabel, menandai peningkatan yang signifikan dalam perlakuan dan integrasi sosial mereka. Namun, Revolusi Industri membawa sikap kontras terhadap difabel. Dengan urbanisasi dan industrialisasi yang cepat di Eropa dan Amerika, persepsi masyarakat sering kali menjadi kasar terhadap difabel. Di pusat-pusat perkotaan yang berkembang pesat, individu difabel sering kali dipandang sebagai beban bagi masyarakat dan menjadi korban perlakuan yang tidak adil. Mereka menghadapi diskriminasi dalam peluang kerja, interaksi sosial, dan akses terhadap layanan dasar. Marginalisasi ini diperparah oleh persepsi umum bahwa individu difabel tidak mampu berkontribusi secara bermakna pada pasar kerja atau masyarakat secara umum.³⁰

Meskipun terjadi kemajuan dalam perawatan medis dan pendirian institusi khusus, Revolusi Industri menyoroti stigma dan diskriminasi yang masih dihadapi individu difabel dalam masyarakat secara luas. Periode ini menjadi pengingat akan kompleksitas pandangan terhadap disabilitas dan perjuangan terus-menerus untuk inklusi dan hak-hak yang setara.

²⁹ Schuelka, 505–506.

³⁰ Jahangir JS, "History Of Disability: Paradigm Shift from Disability to Differently Abled," *Xaverian Research Journal* 6, no. 1 (2018): 55–57.

Abad ke-20 hingga Sekarang

Abad ke-20 menjadi tonggak sejarah yang signifikan dalam perubahan pandangan dan perlakuan terhadap individu difabel. Pasca-Perang Dunia II, terjadi lonjakan kesadaran akan hak-hak difabel yang sebelumnya terpinggirkan. Gerakan hak-hak difabel pun muncul, mengadvokasi prinsip-prinsip kesetaraan, aksesibilitas, dan perlindungan hukum bagi mereka. Inisiatif ini melahirkan perubahan sosial yang mendalam, mendorong pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan dan hak-hak individu difabel.³¹

Salah satu tonggak penting dalam perkembangan ini adalah adopsi Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2006. Konvensi ini menjadi landasan hukum internasional yang mengikat negara-negara anggota untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak individu difabel. Dengan demikian, Konvensi ini menegaskan komitmen global untuk memastikan inklusi difabel dalam segala aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga partisipasi politik.³² Dengan adanya Konvensi ini, upaya untuk memperjuangkan hak-hak difabel menjadi semakin terkoordinasi dan terstruktur. Negara-negara di seluruh dunia diharapkan untuk mengimplementasikan kebijakan dan program yang mendukung inklusi difabel, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi mereka. Dengan demikian, Abad ke-20 memberikan titik balik penting dalam perjalanan perjuangan hak-hak dan pengakuan sosial bagi individu difabel, menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua.

³¹ Lindsey Patterson, "The Oxford Handbook of Disability History," in *1*, 2018, 442.

³² United Nations, *The Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Training Guide*, 2014.